

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 4

TAHUN 2018

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang 2

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1844);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2018.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada desa yang tidak habis digunakan oleh desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.
7. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PERHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan Alokasi Dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4 5

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab/Kota} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

- AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa
 AA_{Kab/kota} = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018
 DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
 DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
 Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.
 Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.

Z3=Rasio 6

- Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten.
 Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten.
 AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima:
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II dari Kepala Desa.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (7) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
- (9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, bidang kegiatan produk unggulan Desa, Badan Usaha Milik Desa, embung, dan sarana olahraga Desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.

(2) Laporan 8

- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 15 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 31 Agustus tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 2 Januari 2018

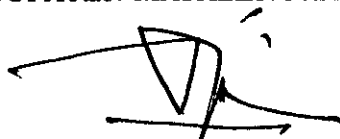
BUPATI MAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



AHMAD SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA**Nomor : 1 Tahun 2018****Tanggal : 2 Januari 2018****Tentang : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN
2018**

NO.	DESA	KECAMATAN	PAGU	TAHAP I (20%)	TAHAP II (40 %)	TAHAP III (40%)
1	CIPASUNG	LEMAHSUGIH	997.868.894	199.573.779	399.147.558	399.147.558
2	BANGBAYANG	LEMAHSUGIH	1.021.197.407	204.239.481	408.478.963	408.478.963
3	BOROGOJOL	LEMAHSUGIH	1.241.576.898	248.315.380	496.630.759	496.630.759
4	CIBULAN	LEMAHSUGIH	901.351.705	180.270.341	360.540.682	360.540.682
5	LEMAHPUTIH	LEMAHSUGIH	1.060.870.433	212.174.087	424.348.173	424.348.173
6	SADAWANGI	LEMAHSUGIH	1.008.196.001	201.639.200	403.278.401	403.278.401
7	KEPUH	LEMAHSUGIH	1.064.944.547	212.988.909	425.977.819	425.977.819
8	PADAREK	LEMAHSUGIH	1.050.248.658	210.049.732	420.099.463	420.099.463
9	KALAPADUA	LEMAHSUGIH	991.708.718	198.341.744	396.683.487	396.683.487
10	CIGALEUH	LEMAHSUGIH	974.109.667	194.821.933	389.643.867	389.643.867
11	MARGAJAYA	LEMAHSUGIH	1.011.782.640	202.356.528	404.713.056	404.713.056
12	SUKAJADI	LEMAHSUGIH	917.529.119	183.505.824	367.011.647	367.011.647
13	MEKARWANGI	LEMAHSUGIH	1.067.082.458	213.416.492	426.832.983	426.832.983
14	SINARGALIH	LEMAHSUGIH	1.109.450.850	221.890.170	443.780.340	443.780.340
15	MEKARMULYA	LEMAHSUGIH	1.115.902.426	223.180.485	446.360.971	446.360.971
16	SUKAMAJU	LEMAHSUGIH	896.140.648	179.228.130	358.456.259	358.456.259
17	CISALAK	LEMAHSUGIH	788.250.890	157.650.178	315.300.356	315.300.356
18	DAYEUHWANGI	LEMAHSUGIH	927.301.677	185.460.335	370.920.671	370.920.671
19	LEMAHSUGIH	LEMAHSUGIH	984.117.754	196.823.551	393.647.102	393.647.102
20	CIPEUNDEUY	BANTARUJEG	1.036.322.477	207.264.495	414.528.991	414.528.991
21	CIMANGGUHILIR	BANTARUJEG	1.360.140.334	272.028.067	544.056.133	544.056.133
22	SALAWANGI	BANTARUJEG	996.274.279	199.254.856	398.509.712	398.509.712
23	BANTARUJEG	BANTARUJEG	887.862.365	177.572.473	355.144.946	355.144.946
24	GUNUNGLARANG	BANTARUJEG	1.214.839.584	242.967.917	485.935.834	485.935.834
25	CIKIDANG	BANTARUJEG	1.076.941.574	215.388.315	430.776.629	430.776.629
26	CINAMBO	BANTARUJEG	1.006.840.925	201.368.185	402.736.370	402.736.370
27	HAURGEULIS	BANTARUJEG	815.007.830	163.001.566	326.003.132	326.003.132
28	SUKAMENAK	BANTARUJEG	962.469.119	192.493.824	384.987.647	384.987.647
29	WADOWETAN	BANTARUJEG	1.075.910.471	215.182.094	430.364.188	430.364.188
30	BABAKANSARI	BANTARUJEG	1.153.895.932	230.779.186	461.558.373	461.558.373
31	SILIHWANGI	BANTARUJEG	1.064.895.450	212.979.090	425.958.180	425.958.180
32	SINDANGHURIP	BANTARUJEG	1.181.308.514	236.261.703	472.523.406	472.523.406
33	SUKASARI	CIKIJING	1.093.974.416	218.794.883	437.589.767	437.589.767
34	CISOKA	CIKIJING	833.396.576	166.679.315	333.358.631	333.358.631
35	SINDANGPANJI	CIKIJING	1.276.543.676	255.308.735	510.617.471	510.617.471
36	CIKIJING	CIKIJING	1.081.209.593	216.241.919	432.483.837	432.483.837
37	SINDANG	CIKIJING	988.471.188	197.694.238	395.388.475	395.388.475
38	BANJARANSARI	CIKIJING	1.125.313.036	225.062.607	450.125.214	450.125.214
39	KASTURI	CIKIJING	1.075.489.095	215.097.819	430.195.638	430.195.638
40	CIDULANG	CIKIJING	1.037.312.971	207.462.594	414.925.188	414.925.188
41	JAGASARI	CIKIJING	994.184.006	198.836.801	397.673.602	397.673.602
42	BAGJASARI	CIKIJING	1.213.863.806	242.772.761	485.545.522	485.545.522
43	SUNALARI	CIKIJING	1.012.129.273	202.425.855	404.851.709	404.851.709
44	CIPULUS	CIKIJING	1.050.546.587	210.109.317	420.218.635	420.218.635
45	KANCANA	CIKIJING	1.031.488.269	206.297.654	412.595.308	412.595.308
46	SUKAMUKTI	CIKIJING	819.042.564	163.808.513	327.617.026	327.617.026

47	CILANCANG	CIKIJING	808.432.415	161.686.483	323.372.966	323.372.966
48	LAMPUYANG	TALAGA	865.933.027	173.186.605	346.373.211	346.373.211
49	CIBEUREUM	TALAGA	896.351.287	179.270.257	358.540.515	358.540.515
50	CIKEUSAL	TALAGA	840.005.665	168.001.133	336.002.266	336.002.266
51	JATIPAMOR	TALAGA	903.161.544	180.632.309	361.264.618	361.264.618
52	ARGASARI	TALAGA	897.105.590	179.421.118	358.842.236	358.842.236
53	CICANIR	TALAGA	825.415.419	165.083.084	330.166.167	330.166.167
54	CAMPAGA	TALAGA	993.220.670	198.644.134	397.288.268	397.288.268
55	SUKAPERNA	TALAGA	1.021.045.458	204.209.092	408.418.183	408.418.183
56	TALAGA KULON	TALAGA	974.384.043	194.876.809	389.753.617	389.753.617
57	TALAGA WETAN	TALAGA	904.198.632	180.839.726	361.679.453	361.679.453
58	GANEAS	TALAGA	834.906.070	166.981.214	333.962.428	333.962.428
59	SALADO	TALAGA	1.018.367.720	203.673.544	407.347.088	407.347.088
60	GUNUNGMANIK	TALAGA	966.642.312	193.328.462	386.656.925	386.656.925
61	KERTAHAYU	TALAGA	772.452.943	154.490.589	308.981.177	308.981.177
62	MEKARRAHARJA	TALAGA	859.658.320	171.931.664	343.863.328	343.863.328
63	MARGAMUKTI	TALAGA	994.045.150	198.809.030	397.618.060	397.618.060
64	MEKARHURIP	TALAGA	978.527.234	195.705.447	391.410.893	391.410.893
65	SAGARA	ARGAPURA	818.657.461	163.731.492	327.462.985	327.462.985
66	CIBUNUT	ARGAPURA	860.903.487	172.180.697	344.361.395	344.361.395
67	TEJAMULYA	ARGAPURA	899.162.692	179.832.538	359.665.077	359.665.077
68	SUKASARI KALER	ARGAPURA	885.733.617	177.146.723	354.293.447	354.293.447
69	ARGAMUKTI	ARGAPURA	960.038.184	192.007.637	384.015.273	384.015.273
70	SUKADANA	ARGAPURA	950.874.639	190.174.928	380.349.855	380.349.855
71	SADASARI	ARGAPURA	926.777.515	185.355.503	370.711.006	370.711.006
72	HAURSEAH	ARGAPURA	936.975.111	187.395.022	374.790.044	374.790.044
73	MEKARWANGI	ARGAPURA	818.002.573	163.600.515	327.201.029	327.201.029
74	CIKARACAK	ARGAPURA	974.681.006	194.936.201	389.872.402	389.872.402
75	HEUBEULISUK	ARGAPURA	1.004.348.921	200.869.784	401.739.568	401.739.568
76	SUKASARI KIDUL	ARGAPURA	855.022.436	171.004.487	342.008.975	342.008.975
77	GUNUNGWANGI	ARGAPURA	1.010.759.139	202.151.828	404.303.656	404.303.656
78	ARGALINGGA	ARGAPURA	889.160.781	177.832.156	355.664.312	355.664.312
79	CIHAUR	MAJA	936.753.781	187.350.756	374.701.513	374.701.513
80	WANAHAYU	MAJA	962.776.272	192.555.254	385.110.509	385.110.509
81	CENGAL	MAJA	821.726.078	164.345.216	328.690.431	328.690.431
82	ANGGRAWATI	MAJA	1.076.575.158	215.315.032	430.630.063	430.630.063
83	CIPICUNG	MAJA	1.000.438.640	200.087.728	400.175.456	400.175.456
84	MALONGPONG	MAJA	821.093.033	164.218.607	328.437.213	328.437.213
85	TEGALSARI	MAJA	798.726.750	159.745.350	319.490.700	319.490.700
86	MAJA UTARA	MAJA	1.009.625.831	201.925.166	403.850.332	403.850.332
87	PASANGGRAHAN	MAJA	796.811.491	159.362.298	318.724.597	318.724.597
88	CIEURIH	MAJA	1.150.540.634	230.108.127	460.216.254	460.216.254
89	KARTABASUKI	MAJA	840.682.460	168.136.492	336.272.984	336.272.984
90	SINDANGKERTA	MAJA	811.510.284	162.302.057	324.604.113	324.604.113
91	BANJARAN	MAJA	765.761.568	153.152.314	306.304.627	306.304.627
92	PANIIS	MAJA	984.266.127	196.853.225	393.706.451	393.706.451
93	CICALUNG	MAJA	759.784.404	151.956.881	303.913.762	303.913.762
94	PAGERAJI	MAJA	821.733.351	164.346.670	328.693.340	328.693.340
95	MAJA SELATAN	MAJA	975.139.463	195.027.893	390.055.785	390.055.785
96	NUNUK BARU	MAJA	1.329.831.927	265.966.385	531.932.771	531.932.771
97	KULUR	MAJALENGKA	988.024.361	197.604.872	395.209.744	395.209.744
98	KAWUNGGIRANG	MAJALENGKA	756.201.618	151.240.324	302.480.647	302.480.647
99	SIDAMUKTI	MAJALENGKA	919.617.369	183.923.474	367.846.947	367.846.947
100	CIBODAS	MAJALENGKA	1.047.553.785	209.510.757	419.021.514	419.021.514
101	CIOMAS	SUKAHAJI	781.132.420	156.226.484	312.452.968	312.452.968
102	PADAHANTEN	SUKAHAJI	857.924.038	171.584.808	343.169.615	343.169.615

103	SUKAHAJI	SUKAHAJI	899.308.516	179.861.703	359.723.406	359.723.406
104	SALAGEDANG	SUKAHAJI	873.499.700	174.699.940	349.399.880	349.399.880
105	CIKEUSIK	SUKAHAJI	867.245.373	173.449.075	346.898.149	346.898.149
106	JAYI	SUKAHAJI	862.017.575	172.403.515	344.807.030	344.807.030
107	NANGGEWER	SUKAHAJI	992.866.546	198.573.309	397.146.618	397.146.618
108	PALABUAN	SUKAHAJI	970.019.771	194.003.954	388.007.908	388.007.908
109	CIKONENG	SUKAHAJI	764.989.223	152.997.845	305.995.689	305.995.689
110	BABAKANMANJETI	SUKAHAJI	847.211.928	169.442.386	338.884.771	338.884.771
111	TANJUNGSARI	SUKAHAJI	827.637.468	165.527.494	331.054.987	331.054.987
112	CIKALONG	SUKAHAJI	870.865.306	174.173.061	348.346.123	348.346.123
113	CANDRAJAYA	SUKAHAJI	798.622.357	159.724.471	319.448.943	319.448.943
114	PAJAJAR	RAJAGALUH	829.579.936	165.915.987	331.831.974	331.831.974
115	TEJA	RAJAGALUH	918.180.014	183.636.003	367.272.006	367.272.006
116	PAYUNG	RAJAGALUH	1.010.439.715	202.087.943	404.175.886	404.175.886
117	BABAKANKAREO	RAJAGALUH	929.450.152	185.890.030	371.780.061	371.780.061
118	SINDANGPANO	RAJAGALUH	995.733.923	199.146.785	398.293.569	398.293.569
119	SADOMAS	RAJAGALUH	804.527.955	160.905.591	321.811.182	321.811.182
120	KUMBUNG	RAJAGALUH	943.265.486	188.653.097	377.306.194	377.306.194
121	RAJAGALUH KIDUL	RAJAGALUH	932.692.767	186.538.553	373.077.107	373.077.107
122	SINGAWADA	RAJAGALUH	865.593.964	173.118.793	346.237.586	346.237.586
123	RAJAGALUH LOR	RAJAGALUH	822.708.048	164.541.610	329.083.219	329.083.219
124	CIPINANG	RAJAGALUH	851.240.615	170.248.123	340.496.246	340.496.246
125	CISETU	RAJAGALUH	861.106.243	172.221.249	344.442.497	344.442.497
126	RAJAGALUH	RAJAGALUH	789.897.309	157.979.462	315.958.924	315.958.924
127	PARAKAN	LEUWIMUNDING	910.679.001	182.135.800	364.271.600	364.271.600
128	PATUANAN	LEUWIMUNDING	919.582.013	183.916.403	367.832.805	367.832.805
129	NANGGERANG	LEUWIMUNDING	878.043.334	175.608.667	351.217.333	351.217.333
130	LAME	LEUWIMUNDING	866.018.020	173.203.604	346.407.208	346.407.208
131	MINDI	LEUWIMUNDING	981.355.452	196.271.090	392.542.181	392.542.181
132	RAJAWANGI	LEUWIMUNDING	978.354.005	195.670.801	391.341.602	391.341.602
133	LEUWIKUJANG	LEUWIMUNDING	993.191.186	198.638.237	397.276.474	397.276.474
134	MIRAT	LEUWIMUNDING	981.650.989	196.330.198	392.660.396	392.660.396
135	LEUWIMUNDING	LEUWIMUNDING	943.513.293	188.702.659	377.405.317	377.405.317
136	CIPARAY	LEUWIMUNDING	991.718.238	198.343.648	396.687.295	396.687.295
137	HEULEUT	LEUWIMUNDING	916.640.745	183.328.149	366.656.298	366.656.298
138	KARANGASEM	LEUWIMUNDING	936.542.456	187.308.491	374.616.982	374.616.982
139	TANJUNGSARI	LEUWIMUNDING	871.100.016	174.220.003	348.440.006	348.440.006
140	PARUNGJAYA	LEUWIMUNDING	890.254.577	178.050.915	356.101.831	356.101.831
141	BURUJUL KULON	JATTIWANGI	1.113.503.565	222.700.713	445.401.426	445.401.426
142	BURUJUL WETAN	JATTIWANGI	1.270.190.722	254.038.144	508.076.289	508.076.289
143	CICADAS	JATTIWANGI	917.786.508	183.557.302	367.114.603	367.114.603
144	ANDIR	JATTIWANGI	1.018.065.104	203.613.021	407.226.041	407.226.041
145	SUKARAJA WETAN	JATTIWANGI	966.417.005	193.283.401	386.566.802	386.566.802
146	PINANGRAJA	JATTIWANGI	910.426.286	182.085.257	364.170.514	364.170.514
147	CIBENTAR	JATTIWANGI	1.195.098.359	239.019.672	478.039.344	478.039.344
148	LEUWEUNGGEDE	JATTIWANGI	940.316.516	188.063.303	376.126.606	376.126.606
149	CIBOLERANG	JATTIWANGI	1.011.320.080	202.264.016	404.528.032	404.528.032
150	SUTAWANGI	JATTIWANGI	934.399.421	186.879.884	373.759.768	373.759.768
151	JATISURA	JATTIWANGI	864.925.460	172.985.092	345.970.184	345.970.184
152	JATTIWANGI	JATTIWANGI	953.757.878	190.751.576	381.503.151	381.503.151
153	LOJI	JATTIWANGI	887.421.591	177.484.318	354.968.637	354.968.637
154	SUKARAJA KULON	JATTIWANGI	930.197.077	186.039.415	372.078.831	372.078.831
155	MEKARSARI	JATTIWANGI	821.505.108	164.301.022	328.602.043	328.602.043
156	SURAWANGI	JATTIWANGI	918.689.025	183.737.805	367.475.610	367.475.610
157	GANDU	DAWUAN	1.002.079.408	200.415.882	400.831.763	400.831.763
158	DAWUAN	DAWUAN	908.600.630	181.720.126	363.440.252	363.440.252

159	GENTENG	DAWUAN	1.016.642.745	203.328.549	406.657.098	406.657.098
160	MANDAPA	DAWUAN	919.249.594	183.849.919	367.699.837	367.699.837
161	BALIDA	DAWUAN	968.375.819	193.675.164	387.350.328	387.350.328
162	KARANGANYAR	DAWUAN	798.009.191	159.601.838	319.203.677	319.203.677
163	SALAWANA	DAWUAN	864.367.867	172.873.573	345.747.147	345.747.147
164	BOJONGCIDERES	DAWUAN	811.638.488	162.327.698	324.655.395	324.655.395
165	SINARJATI	DAWUAN	921.890.281	184.378.056	368.756.112	368.756.112
166	PASIRMALATI	DAWUAN	814.253.557	162.850.711	325.701.423	325.701.423
167	BATURUYUK	DAWUAN	892.172.906	178.434.581	356.869.162	356.869.162
168	HEULEUT	KADIPATEN	1.072.244.328	214.448.866	428.897.731	428.897.731
169	KADIPATEN	KADIPATEN	1.156.414.055	231.282.811	462.565.622	462.565.622
170	BABAKANANYAR	KADIPATEN	817.203.144	163.440.629	326.881.257	326.881.257
171	KARANGSAMBUNG	KADIPATEN	1.108.037.245	221.607.449	443.214.898	443.214.898
172	LIANGJULANG	KADIPATEN	1.178.954.488	235.790.898	471.581.795	471.581.795
173	PAGANDON	KADIPATEN	1.006.530.994	201.306.199	402.612.398	402.612.398
174	CIPAKU	KADIPATEN	866.880.604	173.376.121	346.752.242	346.752.242
175	PAKUBEUREUM	KERTAJATI	869.581.503	173.916.301	347.832.601	347.832.601
176	SUKAWANA	KERTAJATI	817.860.727	163.572.145	327.144.291	327.144.291
177	KERTAWINANGUN	KERTAJATI	836.978.290	167.395.658	334.791.316	334.791.316
178	PALASAH	KERTAJATI	997.445.342	199.489.068	398.978.137	398.978.137
179	BABAKAN	KERTAJATI	965.008.939	193.001.788	386.003.576	386.003.576
180	KERTAJATI	KERTAJATI	1.035.810.354	207.162.071	414.324.142	414.324.142
181	BANTARJATI	KERTAJATI	813.968.452	162.793.690	325.587.381	325.587.381
182	PASIRIPIS	KERTAJATI	929.316.824	185.863.365	371.726.730	371.726.730
183	SUKAMULYA	KERTAJATI	977.998.017	195.599.603	391.199.207	391.199.207
184	KERTASARI	KERTAJATI	1.081.434.180	216.286.836	432.573.672	432.573.672
185	MEKARJAYA	KERTAJATI	1.052.321.459	210.464.292	420.928.584	420.928.584
186	MEKARMULYA	KERTAJATI	1.089.075.116	217.815.023	435.630.047	435.630.047
187	SUKAKERTA	KERTAJATI	972.477.349	194.495.470	388.990.939	388.990.939
188	SAHBANDAR	KERTAJATI	774.142.769	154.828.554	309.657.107	309.657.107
189	BIYAWAK	JATITUJUH	811.510.435	162.302.087	324.604.174	324.604.174
190	PANYINGKIRAN	JATITUJUH	835.433.626	167.086.725	334.173.450	334.173.450
191	PANONGAN	JATITUJUH	861.603.876	172.320.775	344.641.551	344.641.551
192	RANDEGAN WETAN	JATITUJUH	1.034.547.991	206.909.598	413.819.196	413.819.196
193	PUTRIDALEM	JATITUJUH	851.159.178	170.231.836	340.463.671	340.463.671
194	JATITENGAH	JATITUJUH	883.562.379	176.712.476	353.424.951	353.424.951
195	JATITUJUH	JATITUJUH	896.113.114	179.222.623	358.445.246	358.445.246
196	BABAJURANG	JATITUJUH	789.376.773	157.875.355	315.750.709	315.750.709
197	PILANGSARI	JATITUJUH	1.099.893.657	219.978.731	439.957.463	439.957.463
198	JATIRAGA	JATITUJUH	988.679.098	197.735.820	395.471.639	395.471.639
199	SUMBER WETAN	JATITUJUH	1.085.499.237	217.099.847	434.199.695	434.199.695
200	PANGKALANPARI	JATITUJUH	988.036.624	197.607.325	395.214.650	395.214.650
201	RANDEGAN KULON	JATITUJUH	985.891.688	197.178.338	394.356.675	394.356.675
202	SUMBER KULON	JATITUJUH	1.006.403.632	201.280.726	402.561.453	402.561.453
203	PASINDANGAN	JATITUJUH	985.039.297	197.007.859	394.015.719	394.015.719
204	CIBOGOR	LIGUNG	1.019.153.433	203.830.687	407.661.373	407.661.373
205	BEBER	LIGUNG	815.753.788	163.150.758	326.301.515	326.301.515
206	BEUSI	LIGUNG	893.403.016	178.680.603	357.361.206	357.361.206
207	TEGALAREN	LIGUNG	850.909.573	170.181.915	340.363.829	340.363.829
208	BUNTU	LIGUNG	861.194.038	172.238.808	344.477.615	344.477.615
209	LIGUNG	LIGUNG	845.386.628	169.077.326	338.154.651	338.154.651
210	WANASALAM	LIGUNG	811.307.623	162.261.525	324.523.049	324.523.049
211	AMPEL	LIGUNG	1.007.351.604	201.470.321	402.940.642	402.940.642
212	BANTARWARU	LIGUNG	837.087.749	167.417.550	334.835.100	334.835.100
213	MAJASARI	LIGUNG	941.275.802	188.255.160	376.510.321	376.510.321
214	KEDUNGKENCANA	LIGUNG	1.001.595.353	200.319.071	400.638.141	400.638.141

215	KERTASARI	LIGUNG	879.978.227	175.995.645	351.991.291	351.991.291
216	LEUWEUNGHAPIT	LIGUNG	814.105.205	162.821.041	325.642.082	325.642.082
217	LIGUNG LOR	LIGUNG	817.718.429	163.543.686	327.087.372	327.087.372
218	SUKAWERA	LIGUNG	865.436.481	173.087.296	346.174.592	346.174.592
219	GANDAWESI	LIGUNG	923.167.156	184.633.431	369.266.863	369.266.863
220	KODASARI	LIGUNG	884.224.747	176.844.949	353.689.899	353.689.899
221	LEUWILIANG BARU	LIGUNG	820.186.888	164.037.378	328.074.755	328.074.755
222	KEDUNGSARI	LIGUNG	970.825.051	194.165.010	388.330.020	388.330.020
223	BONGAS WETAN	SUMBERJAYA	948.127.438	189.625.488	379.250.975	379.250.975
224	BONGAS KULON	SUMBERJAYA	870.052.463	174.010.493	348.020.985	348.020.985
225	GARAWANGI	SUMBERJAYA	895.219.172	179.043.834	358.087.669	358.087.669
226	RANCAPUTAT	SUMBERJAYA	810.054.860	162.010.972	324.021.944	324.021.944
227	BANJARAN	SUMBERJAYA	843.053.113	168.610.623	337.221.245	337.221.245
228	SEPAT	SUMBERJAYA	748.522.282	149.704.456	299.408.913	299.408.913
229	PANINGKIRAN	SUMBERJAYA	891.985.733	178.397.147	356.794.293	356.794.293
230	PARAPATAN	SUMBERJAYA	767.649.719	153.529.944	307.059.888	307.059.888
231	PANJALIN KIDUL	SUMBERJAYA	1.159.288.245	231.857.649	463.715.298	463.715.298
232	CIDENOK	SUMBERJAYA	921.927.239	184.385.448	368.770.895	368.770.895
233	LOJIKOBONG	SUMBERJAYA	949.308.620	189.861.724	379.723.448	379.723.448
234	PANJALIN LOR	SUMBERJAYA	987.325.823	197.465.165	394.930.329	394.930.329
235	SUMBERJAYA	SUMBERJAYA	994.289.135	198.857.827	397.715.654	397.715.654
236	PANCAKUSUJI	SUMBERJAYA	776.601.399	155.320.280	310.640.560	310.640.560
237	GELOK MULYA	SUMBERJAYA	801.374.512	160.274.902	320.549.805	320.549.805
238	CJUREY	PANYINGKIRAN	818.715.273	163.743.055	327.486.109	327.486.109
239	PASIRMUNCANG	PANYINGKIRAN	806.415.073	161.283.015	322.566.029	322.566.029
240	JATIPAMOR	PANYINGKIRAN	845.317.479	169.063.496	338.126.992	338.126.992
241	BANTRANGSANA	PANYINGKIRAN	999.990.928	199.998.186	399.996.371	399.996.371
242	JATISERANG	PANYINGKIRAN	1.060.861.420	212.172.284	424.344.568	424.344.568
243	BONANG	PANYINGKIRAN	883.111.170	176.622.234	353.244.468	353.244.468
244	LEUWISEENG	PANYINGKIRAN	948.068.007	189.613.601	379.227.203	379.227.203
245	PANYINGKIRAN	PANYINGKIRAN	906.594.860	181.318.972	362.637.944	362.637.944
246	KARYAMUKTI	PANYINGKIRAN	889.546.005	177.909.201	355.818.402	355.818.402
247	MAJASUKA	PALASAH	918.938.935	183.787.787	367.575.574	367.575.574
248	CISAMBENG	PALASAH	952.330.116	190.466.023	380.932.046	380.932.046
249	PALASAH	PALASAH	854.696.903	170.939.381	341.878.761	341.878.761
250	WERAGATI	PALASAH	830.104.376	166.020.875	332.041.750	332.041.750
251	TRAJAYA	PALASAH	873.804.139	174.760.828	349.521.656	349.521.656
252	TARIKOLOT	PALASAH	947.095.880	189.419.176	378.838.352	378.838.352
253	BUNIWANGI	PALASAH	837.005.763	167.401.153	334.802.305	334.802.305
254	SINDANGHAJI	PALASAH	919.376.955	183.875.391	367.750.782	367.750.782
255	WARINGIN	PALASAH	1.144.115.347	228.823.069	457.646.139	457.646.139
256	PASIR	PALASAH	875.018.162	175.003.632	350.007.265	350.007.265
257	KARAMAT	PALASAH	904.464.952	180.892.990	361.785.981	361.785.981
258	ENGGALWANGI	PALASAH	862.162.136	172.432.427	344.864.854	344.864.854
259	SINDANGWASA	PALASAH	814.783.559	162.956.712	325.913.424	325.913.424
260	KAWUNGHILIR	CIGASONG	743.720.457	148.744.091	297.488.183	297.488.183
261	TAJUR	CIGASONG	825.896.794	165.179.359	330.358.718	330.358.718
262	TENJOLAYAR	CIGASONG	895.722.054	179.144.411	358.288.821	358.288.821
263	BARIBIS	CIGASONG	1.027.220.248	205.444.050	410.888.099	410.888.099
264	BATUJAYA	CIGASONG	919.289.838	183.857.968	367.715.935	367.715.935
265	KUTAMANGGU	CIGASONG	892.138.564	178.427.713	356.855.426	356.855.426
266	KARAYUNAN	CIGASONG	895.361.576	179.072.315	358.144.630	358.144.630
267	BANTARAGUNG	SINDANGWANGI	999.469.407	199.893.881	399.787.763	399.787.763
268	PADAHERANG	SINDANGWANGI	867.171.120	173.434.224	346.868.448	346.868.448
269	LENGKONG KULON	SINDANGWANGI	803.796.973	160.759.395	321.518.789	321.518.789
270	JERUKLEUEUT	SINDANGWANGI	1.042.724.224	208.544.845	417.089.690	417.089.690

271	SINDANGWANGI	SINDANGWANGI	955.865.575	191.173.115	382.346.230	382.346.230
272	BUAHKAPAS	SINDANGWANGI	777.479.727	155.495.945	310.991.891	310.991.891
273	UJUNGBERUNG	SINDANGWANGI	942.912.734	188.582.547	377.165.094	377.165.094
274	BALAGEDOG	SINDANGWANGI	1.114.288.208	222.857.642	445.715.283	445.715.283
275	LEUWILAJA	SINDANGWANGI	988.452.393	197.690.479	395.380.957	395.380.957
276	LENGKONG WETAN	SINDANGWANGI	979.707.861	195.941.572	391.883.144	391.883.144
277	GENTENG	BANJARAN	817.691.381	163.538.276	327.076.552	327.076.552
278	SUNIA	BANJARAN	885.259.967	177.051.993	354.103.987	354.103.987
279	DARMALARANG	BANJARAN	777.919.900	155.583.980	311.167.960	311.167.960
280	SINDANGPALA	BANJARAN	772.004.753	154.400.951	308.801.901	308.801.901
281	BANJARAN	BANJARAN	771.017.695	154.203.539	308.407.078	308.407.078
282	KAGOK	BANJARAN	814.090.713	162.818.143	325.636.285	325.636.285
283	CIMEONG	BANJARAN	836.542.221	167.308.444	334.616.888	334.616.888
284	PANYINDANGAN	BANJARAN	751.252.074	150.250.415	300.500.829	300.500.829
285	KAREO	BANJARAN	772.301.321	154.460.264	308.920.528	308.920.528
286	SANGIANG	BANJARAN	910.837.955	182.167.591	364.335.182	364.335.182
287	SUNIA BARU	BANJARAN	860.454.756	172.090.951	344.181.902	344.181.902
288	HEGARMANAH	BANJARAN	783.367.945	156.673.589	313.347.178	313.347.178
289	GIRIMULYA	BANJARAN	869.439.908	173.887.982	347.775.963	347.775.963
290	SEDAREJA	CINGAMBUL	1.100.256.393	220.051.279	440.102.557	440.102.557
291	CIDADAP	CINGAMBUL	1.107.941.168	221.588.234	443.176.467	443.176.467
292	MANIIS	CINGAMBUL	1.119.034.093	223.806.819	447.613.637	447.613.637
293	NAGARAKEMBANG	CINGAMBUL	960.976.736	192.195.347	384.390.694	384.390.694
294	WANGKELANG	CINGAMBUL	1.128.807.265	225.761.453	451.522.906	451.522.906
295	CIMANGGU	CINGAMBUL	832.878.749	166.575.750	333.151.499	333.151.499
296	CINGAMBUL	CINGAMBUL	890.478.689	178.095.738	356.191.476	356.191.476
297	CIKONDANG	CINGAMBUL	793.528.530	158.705.706	317.411.412	317.411.412
298	CIRANJENG	CINGAMBUL	801.909.992	160.381.998	320.763.997	320.763.997
299	RAWA	CINGAMBUL	1.497.371.036	299.474.207	598.948.414	598.948.414
300	KONDANGMEKAR	CINGAMBUL	1.049.506.127	209.901.225	419.802.451	419.802.451
301	CINTAASIH	CINGAMBUL	988.509.470	197.701.894	395.403.788	395.403.788
302	MUKTISARI	CINGAMBUL	876.663.723	175.332.745	350.665.489	350.665.489
303	JATISAWIT	KASOKANDEL	903.175.148	180.635.030	361.270.059	361.270.059
304	LEUWIKIDANG	KASOKANDEL	928.046.673	185.609.335	371.218.669	371.218.669
305	RANJI KULON	KASOKANDEL	1.016.440.603	203.288.121	406.576.241	406.576.241
306	RANJI WETAN	KASOKANDEL	1.347.871.025	269.574.205	539.148.410	539.148.410
307	GUNUNGSARI	KASOKANDEL	1.008.041.860	201.608.372	403.216.744	403.216.744
308	KASOKANDEL	KASOKANDEL	977.418.625	195.483.725	390.967.450	390.967.450
309	GIRIMUKTI	KASOKANDEL	1.104.755.680	220.951.136	441.902.272	441.902.272
310	JATIMULYA	KASOKANDEL	1.185.507.649	237.101.530	474.203.059	474.203.059
311	WANAJAYA	KASOKANDEL	1.221.810.003	244.362.001	488.724.001	488.724.001
312	GANDASARI	KASOKANDEL	870.406.673	174.081.335	348.162.669	348.162.669
313	PASIRAYU	SINDANG	799.824.018	159.964.804	319.929.607	319.929.607
314	SINDANG	SINDANG	972.085.714	194.417.143	388.834.285	388.834.285
315	GARAWASTU	SINDANG	902.673.354	180.534.671	361.069.342	361.069.342
316	INDRAKILA	SINDANG	889.818.444	177.963.689	355.927.378	355.927.378
317	GUNUNGKUNING	SINDANG	886.056.768	177.211.354	354.422.707	354.422.707
318	SANGKANHURIP	SINDANG	916.536.021	183.307.204	366.614.408	366.614.408
319	BAYUREJA	SINDANG	872.669.438	174.533.888	349.067.775	349.067.775
320	SUKADANA	MALUSMA	1.387.006.645	277.401.329	554.802.658	554.802.658
321	WERASARI	MALUSMA	1.254.811.416	250.962.283	501.924.567	501.924.567
322	MALUSMA	MALUSMA	1.263.662.536	252.732.507	505.465.014	505.465.014
323	LEBAKWANGI	MALUSMA	1.234.250.990	246.850.198	493.700.396	493.700.396
324	CIMUNCANG	MALUSMA	1.376.672.080	275.334.416	550.668.832	550.668.832
325	CIRANCA	MALUSMA	1.286.206.077	257.241.215	514.482.431	514.482.431
326	BANYUSARI	MALUSMA	1.259.755.924	251.951.185	503.902.370	503.902.370

327	BUNINAGARA	MALUSMA	1.007.174.116	201.434.823	402.869.647	402.869.647
328	JAGAMULYA	MALUSMA	918.412.860	183.682.572	367.365.144	367.365.144
329	GIRIMUKTI	MALUSMA	1.061.856.705	212.371.341	424.742.682	424.742.682
330	KRAMAT JAYA	MALUSMA	1.038.766.262	207.753.252	415.506.505	415.506.505
Jumlah			312.485.897.000	62.497.179.400	124.994.358.800	124.994.358.800

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

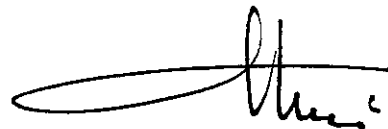
SUTRISNO

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**



AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003